

BAB VI

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis data 2018–2022, dampak dominasi ekonomi China di Zambia semakin nyata. Menurut kajian Brautigam (CARI), pada akhir 2020 Zambia memiliki kewajiban utang kepada negara donor China yang jumlahnya setara dengan sekitar 43% dari GNI tahun 2019. Sebagian besar pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur ekonomi pada sektor transportasi, energi, telekomunikasi. Dengan demikian, meski sejumlah infrastruktur bertambah, kendali atas proyek-proyek strategis tersebut tetap berada di tangan negara investor yaitu China. Kondisi ini diperkuat oleh temuan bahwa sektor-sektor krusial Zambia didominasi entitas China. Misalnya, perusahaan China memiliki saham mayoritas pada tambang-tambang tembaga utama Zambia. Perusahaan-perusahaan konstruksi China juga menguasai sebagian besar proyek pembangunan jalan dan bangunan di Zambia. Temuan ini menunjukkan bahwa arus investasi dan bantuan dari China lebih banyak menguntungkan pihak pemberi pinjaman, sehingga Zambia menanggung beban utang yang besar serta kendala kebijakan domestik. Sehingga hasil dari analisis ini sejalan dengan kerangka konsep ketergantungan. Menurut konsep ini, ekonomi Zambia sebagai negara penerima bantuan dipengaruhi kuat oleh kekuatan negara besar seperti China. Struktur ekspor dan investasi yang timpang tersebut menghasilkan skenario dimana surplus ekonomi Zambia dialirkan ke luar negeri, sedangkan kemampuan negara ini berkembang secara mandiri menjadi terbatas dan tidak dapat mandiri. Dalam hal ini, model pembangunan Zambia tetap terjebak pada orientasi ekstraktif pada bidang ekspor dan pengolahan bahan mentah, sesuai dengan pengertian dari konsep dependensi dalam faktor finansial maupun teknologi.

Hasil analisis ini sejalan dengan kerangka konsep ketergantungan. Menurut konsep ini, perekonomian Zambia sebagai negara penerima bantuan sangat dipengaruhi oleh kekuatan negara besar seperti China. Struktur ekspor dan investasi yang tidak merata mengakibatkan terjadinya skenario surplus ekonomi Zambia yang disalurkan ke luar negeri, sementara kemampuan negara tersebut untuk berkembang secara mandiri terbatas dan tidak dapat mandiri. Dalam hal ini, model pembangunan Zambia masih terjebak dalam orientasi ekstraktif

di bidang ekspor dan pengolahan bahan baku, sesuai dengan pemahaman konsep ketergantungan pada faktor finansial dan teknologi. Hal ini mengindikasikan menguatnya ketimpangan struktural. Kenyataan bahwa Zambia "terjebak dalam orientasi ekstraktif" merupakan konsekuensi langsung dari struktur ketergantungan. Terus mengalirnya bahan baku seperti tembaga dari Zambia ke China dan terbatasnya nilai tambah lokal berarti bahwa struktur ekonomi Zambia pada dasarnya tidak berubah dari masa kolonialnya tetap menjadi pemasok komoditas primer. Kebijakan luar negeri China yang agresif—melalui forum multilateral seperti Forum on China-Africa Cooperation (FOCAC) dan inisiatif Sabuk dan Jalan—secara strategis membentuk pola ketergantungan ekonomi Zambia. FOCAC misalnya, menjadi mekanisme formal bagi China untuk menjanjikan investasi dan pinjaman infrastruktur besar-besaran yang selaras dengan agenda domestiknya. Melalui skema tersebut, dana China ditujukan ke proyek strategis Zambia (energi, transportasi, pertambangan) sekaligus memastikan perusahaan-perusahaan BUMN mengendalikan pelaksanaan dan pengelolaannya. Dengan begitu, arus bantuan dan investasi ini bukan sekadar kerja sama ekonomi biasa, melainkan instrumen kekuatan jangka panjang yang menargetkan sektor-sektor strategis Zambia. Meskipun ada infrastruktur baru, model ekonomi yang mendasarinya melanggengkan ketimpangan, dengan manfaat pertumbuhan yang sebagian besar diperoleh oleh negara inti (China), daripada mendorong industrialisasi yang beragam dan mandiri di Zambia. Hal ini menyoroti bahwa "pembangunan" yang dibawa oleh investasi China tidak selalu transformatif dalam cara yang mengurangi ketimpangan struktural, tetapi justru memperkuat pola stratifikasi ekonomi global yang ada. Mekanisme bantuan tersebut mengunci Zambia dalam subordinasi ekonomi. Pembiayaan proyek infrastruktur China di Zambia umumnya diwujudkan dalam bentuk pinjaman yang mensyaratkan penggunaan kontraktor dan tenaga kerja China sehingga hampir semua pembangunan dikelola entitas China dan keterlibatan lokal sangat terbatas. Di samping itu, penguasaan jangka panjang oleh perusahaan asing atas aset strategis (misalnya pelabuhan) memungkinkan mereka menentukan alur akses ekonomi dan distribusi sumber daya. Kondisi ini membatasi otonomi kebijakan dalam negeri Zambia, karena setiap keputusan pembangunan harus memperhitungkan kepentingan China. Singkatnya, bantuan dan investasi China lebih berfungsi sebagai alat kendali jangka panjang daripada kerja sama setara.

Perspektif teori neo-imperialisme memberikan kerangka analitis yang relevan dalam

Finsy Aurelia Putri Kinanti, 2025

ANALISIS KETERGANTUNGAN EKONOMI ZAMBIA SEBAGAI BENTUK DOMINASI EKONOMI CHINA DI ZAMBIA PADA SEKTOR BANTUAN LUAR NEGERI (2018 - 2022)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Hubungan Internasional

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

menjelaskan dinamika hubungan antara China dan Zambia, terutama terkait dominasi ekonomi yang terungkap melalui berbagai data dan temuan. Teori ini menyoroti situasi bagaimana negara-negara besar menggunakan kekuatan ekonomi sebagai instrumen untuk mempertahankan pengaruh dan kontrol terhadap negara-negara berkembang, bukan lagi melalui kolonialisme secara langsung, tetapi lewat mekanisme yang lebih halus, seperti bantuan luar negeri, investasi, dan utang. Dalam kasus Zambia, hasil analisis menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi tergerus oleh kepentingan luar negeri. Sebagaimana diilustrasikan oleh pemerintahan Sata, usulan reformasi kebijakan ekonomi Zambia dibatalkan akibat tekanan bisnis China. Hal ini menguatkan argumen bahwa bantuan China dalam praktiknya berfungsi sebagai instrumen kekuatan ekonomi, bukan semata kemurahan hati, tetapi ada maksud tertentu untuk mencari keuntungan dalam kerjasama ini. Oleh karena itu, teori neo-imperialisme sangat tepat digunakan sebagai kaca mata dalam memahami bahwa hubungan China-Zambia bukanlah hubungan timbal balik yang seimbang, melainkan bentuk baru dari dominasi ekonomi yang membatasi ruang gerak negara penerima seperti Zambia dalam menentukan arah pembangunannya secara mandiri.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan, dapat disimpulkan bahwa ketergantungan ekonomi Zambia pada China merupakan manifestasi neo-imperialisme modern. Hubungan Zambia dengan China pada periode 2018-2022 terbukti asimetris dan bersifat dominasi yang merujuk pada aliran sumber daya mengarah ke luar negeri, bukan saling menguntungkan secara setara. Temuan ini konsisten dengan teori neo-imperialisme dan dependensi, yang memandang bahwa negara penerima bantuan luar negeri berada dalam jebakan pertumbuhan yang berpihak pada negara donor. Secara praktis, dominasi ini membatasi ruang gerak kebijakan ekonomi Zambia, karena setiap langkah pembangunan harus mempertimbangkan kepentingan eksternal. Kesimpulannya, pola hubungan ini memerlukan perhatian kebijakan serius agar Zambia tidak terperangkap lebih jauh dalam ketergantungan ekonomi.

6.2 Saran

Pada bagian ini menyajikan rekomendasi kebijakan yang dapat ditindaklanjuti bagi pemerintah Zambia untuk mendorong kemitraan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan dengan China, memitigasi risiko dominasi ekonomi dan neo-imperialisme. Rekomendasi ini didasarkan pada kelemahan dan kerentanan yang teridentifikasi dalam pendekatan Zambia saat

ini. Dengan menerapkan sistem inspeksi yang kuat, teratur, dan tanpa pemberitahuan di semua tambang dan proyek infrastruktur yang dikelola China untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan Zambia, termasuk yang berkaitan dengan jam kerja, kompensasi lembur, dan peralatan keselamatan. Secara aktif melindungi dan mendukung hak pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja tanpa intimidasi atau ancaman pemecatan, karena praktik saat ini melanggar hak untuk berorganisasi. Membangun saluran yang jelas bagi pekerja untuk melaporkan pelanggaran dan memastikan penyelidikan dan ganti rugi yang cepat. Selain itu, memastikan bahwa mekanisme hukum dapat diakses dan efektif bagi pekerja untuk mencari keadilan atas pelanggaran hak, termasuk penyediaan bantuan hukum dan memastikan bahwa putusan pengadilan ditegakkan terhadap perusahaan yang terbukti melanggar. Penegakan yang lemah saat ini memungkinkan "super-eksploitasi". Penguatan penegakan hukum sangat penting tidak hanya untuk melindungi hak-hak, tetapi juga untuk merebut kembali kedaulatan nasional atas standar ketenagakerjaan dan mencegah erosi modal manusia, yang merupakan hal mendasar bagi pembangunan jangka panjang yang adil.

Selanjutnya, melihat bahwa sebagian besar utang Zambia kepada China berbentuk pinjaman yang tidak transparan dengan rincian terbatas mengenai syarat-syarat yang mengikat, dan bahwa pinjaman seringkali melewati mekanisme parlemen. Untuk mengatasi hal ini, perlu hadirnya aturan seperti undang-undang yang mewajibkan semua pinjaman luar negeri, terlepas dari kreditornya, untuk menjalani pemeriksaan dan persetujuan parlemen yang ketat sebelum ditandatangani. Ini memastikan pengawasan publik dan akuntabilitas. Kurangnya transparansi dan pengawasan parlemen memungkinkan perjanjian pinjaman "terikat" yang non-kompetitif dan berpotensi eksploitatif. Mewajibkan persetujuan memperkuat tata kelola demokratis dan memungkinkan penilaian yang lebih informatif tentang keberlanjutan utang jangka panjang dan kepentingan nasional. menuntut pengungkapan penuh semua syarat pinjaman, termasuk suku bunga, jadwal pembayaran, masa tenggang, dan persyaratan jaminan. Informasi ini harus tersedia untuk umum. Syarat pinjaman yang tidak jelas berkontribusi pada "jebakan utang". Transparansi penuh memberdayakan Zambia untuk menegosiasikan syarat yang lebih baik, menilai biaya riil, dan menghindari klausul tersembunyi yang dapat mengkompromikan aset strategis atau otonomi kebijakan di masa depan.